Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Vol. 16, No. 1, Januari 2024, pp. 17~31
e-ISSN : 2476-1483, p-ISSN : 2086-4515, DOI : https://doi.org/10.55049/jeb.v16i1.246

Kebijakan Investasi Lahan, Review Izin Pemanfaatan Hutan Dan Lahan Pada Ekonomi Korowai Kabupaten Yahukimo

Elius Heluka*
* Dosen Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi IlmuEkonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 23 Desember 2024
Disetujui 22 Januari 2024

Keywords:

Investasi Lahan
Review Izin
Pemanfaatan hutan
Lahan Ekonomi
Analisis Swot

ABSTRAK

***Abstract** : There are important things to pay attention to in this research, namely looking at what factors attract people from outside Papua to invest in land and how the government regulates forest use permits so that business people in the city center of Dekai take the initiative to trade with expensive staple foods, including in the Korowai region, of course with Dependence on foreign products does not directly open up opportunities for people outside Papua to market their national and local products, so that people in Korowai can partly improve their economic status. This research uses SWOT analysis to determine the strengths, weaknesses, opportunities and treatment faced in land investment development policies, forest and land use permits in the Korowai economy. The results of this analysis found that the Korowai area in Yahukimo Regency is in Quadrant III, which means that aggressive growth in the area can be achieved by using existing strengths and opportunities, although there are weaknesses and threats, this does not close opportunities for the development of the land investment sector, forest utilization and land in the Korowai Economy with trade growing in this region although it is still high*

Abstrak : Ada hal penting yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah melihat apa faktor yang menjadi daya tarik bagi masyarakat luar Papua untuk Investasi lahan dan bagaimana peran pemerintah tentang izin pemanfaatan hutan sehingga pelaku bisnis di pusat kota dekai berinisiatif berdagang dengan nilai sembago mahal termasuk di korowai wilayah tentunya dengan ketergantungan pada produk luar, tidak secara langsung membuka peluang bagi masyarakat luar papua untuk memasarkan produk nasional dan produk lokal mereka, sehingga orang-orang di korowai sebagian dapat memperbaiki status ekonominya. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan perlakuan yang dihadapi pada pengembangan kebijakan investasi lahan, izin pemanfaatan hutan dan lahan pada ekonomi korowai. Hasil analisis ini menemukan bahwa daerah Korowai di Kabupaten Yahukimo berada di Kuadran III, yang berarti pertumbuhan agresif di kawasan dapat dicapai dengan menggunakan kekuatan dan peluang yang ada, walaupun ada kelemahan dan ancaman namun tidak menutup peluang untuk perkembangan sektor Investasi lahan, pemanfaatan Hutan dan lahan pada Ekonomi Korowai dengan perdagangan tumbuh di wilayah ini meski masih bersifat tinggi.

Open access article under the CC BY-SA license.

Alamat Korespondensi :
Elius Heluka, SE., M.Si,
Dosen Program Studi Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : helukae@gmail.com

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan produksi , antara lain diatur bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi dilakukan dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) melalui multi usaha kehutanan.

Pemberian PBPH baik pada hutan lindung maupun hutan produksi dilaksanakan dalam rangka peningkatan investasi bidang kehutanan, selain itu juga untuk memberikan kepastian usaha dan kepastian kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Selain itu, di Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki batas wilayah perbatasan dengan beberapa negara baik darat maupun laut. Kondisi umum wilayah indonesia masih memerlukan penanganan khusus sebab kondisinya masih tertinggal tetapi memiliki kapasitas sumber daya alam yang besar, juga menyimpan konflik-konflik yang dapat menjadi permasalahan antara beberapa daerah.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan pergeseran pengembagan wilayah dari "wilayah depan" menjadi daerah"etalase" untuk menunjukan berbagai keberhasilan pembangunan (Slamet 2011 dalam Siburian 2011). Dari pemikiran Slamet ini Siburian memamaparkan bahwa, etalase tidak pernah menyeguhkan sesuatu yang tidak menarik, sehingga pemerintah seharusnya tidak memamerkan kemiskinan dan ketimpangan dan keterbelakangan. Sehingga harga diri bangsa dapat terangkat karena masyarakat yang hidup di wilayah terbelakang dapat hidup dengan sejahtera (Siburian, 2011).

Provinis Papua Pegunungan yang terletak di bagian timur dari Provinsi Papua berbatasan langsung dengan Nabire dan Merauke. Pegunungan Papua yang termasuk wilayah Kabupaten Yahukimo berbatasan dengan wilayah Boven Diguel dengan garis batas terbentang dari Asmat di utara dan Kabupaten Merauke di selatan. Kota Dekai di timur dan korowai di selatan merupakan kota-kota terletak dengan garis batas daerah/administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Yahukimo Kota Dekai dapat dicapai dari kota Dekai dalam waktu singkat. Walaupun Kabupaten Yahukimo dan Korowai berada dalam satu wilayah atau Kabupaten yang sama hubungan sosial masyarakat di wilayah daerah tersebut berjalan baik. Hal tersebut terjadi karena ikatan kekeluargaan antara berbagai etnis yang tinggi sepanjang garis ras,hubungan keakrapan masih kuat terjalin.

Menurut Titeca (2009 dalam Awang et al, 2013), perdagangan informal di perbatasan dapat menjadi salah satu mekanisme pemberdayaan ekonomi komunitas lokal. Dari Penelitian yang dilakukan di lokasi Korowai Harga beras dijual Rp 2 juta/10 kg susana beras yang dijual di Koperasi Kawe Senggaup Mining, Wilayah 33 Korowai. Harga beras di wilayah penambangan rakyat, di korowai tepatnya di Mining 33, Distrik Kawinggon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua mencapai Rp 2 Juta per 10 kilogram. Selain itu, ada beberapa barang seperti bahan makanan, makanan dan minuman jadi, pakaian, alat elektronik dan alat-alat otomotif terlihat lebih mendominasi pergerakan barang dari kota ke Korowai.

Berdasarkan data, pada tahun 2020 hampir Rp100 juta sampai dengan 200 juta pemasukan yang didapatkan dari perdagangan di wilayah Korowai perbatasan Distrik Kawinggon, Korowai Batu dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan, Korowai Kabupaten Yahukimo-Kabupaten Boven Digoel- Kabupaten Pegunungan Bintang, Hengki Yaluwo, salah satu Pengelola Koperasi Kawe Senggaup Maining di Korowai mengatakan daya beli kebutuhan pokok warga Penambang Emas baik Orang Asli Papua Maupun Non Papua meningkat setiap tahun Harga beras sama di puluhan lokasi penambangan rakyat yang ada di wilayah penambangan rakyat di korowai. Tak hanya beras harga mi instan dan bahan pokok lainnya seperti ikan kaleng, daging ayam, serta rokok juga tinggi. Contoh supermi satu karton kalau ditukar dengan emas itu, dua gram, satu karton kalau dirupiahkan 1 juta supermi satu bungkus Rp 25 ribu, rokok surya 12 satu bungkus berukuran besar Rp 100 Ribu, Rokok Sampoerna dan lampion Rp 50 Ribu dan harga ikan Kaleng besar Rp 150 Ribu serta harga telepon seluler (ponsel) juga tinggi. Ponsel tergantung merk, jika ditukar dengan emas maka harganya mulai dari 10 gram sampai 25 gram emas sedangkan lokasi minim 88 hawila di korowai peneliti menemuhkan bahwa tanpa menyebut nilai peningkatannya.

Kondisi ekonomi warga Korowai masih tertinggal di Minim 88 Hawila salah satu lokasi tambang rakyat di korowai di Dekai Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Kabupaten Asmat dan Mappi hingga saat ini masih terisolir dan tertinggal dari pembangunan dan wilayah korowai diapit oleh lima Kabupaten tersebut diatas setiap tahun pemerintah tidak pernah membangun Korowai, hasil kekayaan emas, batu barah belum ada kebijakan investasi lahan, ijin pemanfaatan hutan dan lahan pada Ekonomi Korowai yang sangat minim dan sangat kurang.

Menurut pemilik tanah adat Ben Yarik, salah satu pemiliki dusun kali dairam Korowai di Minim 33 menyatakan bahwa suku korowai adalah suku yang tertinggal dari pembangunan dan infrastruktur jalan dari masing-masing kabupaten, wilayah ini bertahun-tahun pemerintah tidak pernah membangun korowai, tidak ada jaminan dari pemerintah bagi warga di hutan belantara korowai. Jika penambangan emas yang dikelola oleh masyarakat ditutup berarti siapa yang menjamin kehidupan selanjutnya. Leluhur dari masyarakat di hutan korowai, bertahun-tahun belum menikmati pembangunan dari pemerintah seperti daerah lain. Kini penambangan emas di wilayah korowai yang menghidupi ekonomi masyarakat sekitar, untuk itu diharapkan

pemerintah tidak menutup tambang itu, karena telah membiayai masyarakat korowai, yang mana pemerintah belum mampu diperhatikan dan terus tertinggal, selagi masih ada emas yang menjamin.

kebijakan investasi lahan, ijin pemanfaatan hutan dan lahan pada ekonomi Korowai terbagi atas ekonomi pasar dan subsisten dan 75% dari populasi masyarakat penambangan emas bergerak di sektor subsisten. Kegiatan subsisten mereka terutama di tampilkan dalam bentuk usaha perkebunan dan penambangan (dulang emas) berbeda dengan Koperasi Kawe Senggaup Mining, Wilayah 33 Korowai dan usaha mandiri orang manado usahanya ditampilkan dalam bentuk investasi tanpa ijin pemanfaatan lahan dan mampu berinvestasi di sektor Penjualan HP Android, kopi, pinang, kopra, beras, mi instan, dari 9 sembago. Ditambah alat elktonik lainnya seperti Mesin Alkon dengan perangkat keras lainya yang dihasilkan penduduk setempat dipasarkan langsung kepada masyarakat korowai pada saat itu juga habis. Kegiatan industri mineral, kayu, dan perikanan didominasi investor non Papua. Sebagian kebutuhan pangan diimpor dari Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Kabupaten Asmat dan Mappi (4,27% dari seluruh nilai tukar tambang emas). Namun mitra dagang utama untuk impor adalah Timika sebesar 46% dari total impor dari korowai, Jayapura (13%), merauke (10%), wamena (8%) dan yahukimo dan pegunungan bintang sebesar (6%) tahun (2021).

Sehingga peneliti merasa masih sangat perlu mengkaji Kebijakan Investasi lahan, Review Izin Pemanfaatan Hutan dan Lahan Pada Ekonomi Korowai KabupatenYahukimo sebab tidak hanya perdagangan secara formal saja yang dapat dijumpai di wilayah korowai tapi investasi lahan dan izin pemanfatan hutan ini terdapat juga perdagangan informal yang dilakukan masyarakat asli Papua di setempat ataupun pedagang yang datang dari luar wilayah tersebut. Sehingga karakter wilayah korowai perbatasan beralih dari front line (wilayah depan) dari ibu kota Dekai Kabupaten Yahukimo berdaulat menjadi zona kontak secara sosial ekonomi antar warga negara yang saling bertetangga (Leadem, 2012).

Tinjauan Pustaka

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan produksi , antara lain diatur bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi dilakukan dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) melalui multi usaha kehutanan.

Pemberian PBPH baik pada hutan lindung maupun hutan produksi dilaksanakan dalam rangka peningkatan investasi bidang kehutanan, selain itu juga untuk memberikan kepastian usaha dan kepastian kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Dalam rangka kemudahan dalam berinvestasi untuk penyederhanaan dan persepatan proses perizinan berusaha, permohonan PBPH diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan pergeseran pengembagan wilayah berbatasan dari "wilayah depan" menjadi daerah"etalase" untuk menunjukan berbagai keberhasilan pembangunan (Slamet 2011 dalam Siburian 2011).

Dari pemikiran Slamet ini Siburian memamaparkan bahwa, etalase tidak pernah menyeguhkan sesuatu yang tidak menarik, sehingga pemerintah seharusnya tidak memamerkan kemiskinan dan ketimpangan dan keterbelakangan. Sehingga harga diri bangsa dapat terangkat karena masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan dapat hidup dengan sejahtera (Siburian, 2011). Perdagangan informal di perbatasan dapat menjadi salah satu mekanisme pemberdayaan ekonomi komunitas lokal.

Menurut siagian (1983:111) pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (National Building). Dampaknya merupakan isu penting di bidang perdagangan internasional menjadi sangat penting di sektor kawasan perbatasan. Menurut Ratya Anindita dan Michael R.Reed (2012:14).

Karakter wilayah dalam pembangunan perbatasan beralih dari front line (wilayah depan) dari sebuah negara berdaulat menjadi zona kontak secara sosial ekonomi antar warga negara yang saling bertetangga (Leadem, 2012).

Menurut Rangkuti, (2014) memahami karakter wilayah dalam pembangunan baik dari internal maupun eksternal bidang perdagangan perekonomian perlu di analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats Analisisa SWOT digunakan untuk membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan

Dalam analisis SWOT variabel dianalisis di bagi menjadi dua, yaitu variable internal dan eksternal. Variabel Internal dipandang sebagai variabel yang menunjukan kekuatan dan kelemahan dari kondisi wilayah kebijakan investasi lahan, Izin pemanfaatan hutan dan lahan perdagangan pada ekonomi korowai antar wilayah korowai.Variabel Internal yang dipilih adalah:

1. Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Hutan Lindung dan Hutan produksi Bab 1 pasal 1 ayat 23 tentang Lembaga OSS di bidang koordinasi penanaman modal.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dimensinya adalah jumlah angkatan kerja produktif, tingkat pendidikan, dan pelatihan yang pernah diikuti serta pengetahuan dan keterampilan penambangan (Gold Mining).
3. Sumber Daya Alam (SDA) dengan dimensi Pertambangan, Investasi lahan, izin pemanfaatan hutan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan hasil hutan.
4. Lokasi dengan dimensi ketersediaan tenaga kerja, dekat dengan konsumen, kemudahan untuk memasarkan kekayaan alam, kemudahan melintasi batas.
5. Infrastruktur pembangunan jalan dengan dimensi ketersediaan suplay bahan sembago, pos karantina, pelayanan bea cukai, akses jalan raya.
6. Produk yang diperdagangkan, dengan dimensi, kualitas bagus dan harga yang murah.
7. Manfaat yang diterima bagi masyarakat, dengan dimensi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan.
8. Biaya dengan dimensi, harga sewa rendah, biaya tenaga kerja yang murah.
9. Kebijakan pemerintah daerah, dengan dimensi, program pengembangan SDM dan SDA juga program pengembangan potensi perdagangan. Sedangkan variabel eksternal adalah variabel yang menunjukan kesempatan dan tantangan yang dihadapi, yaitu:
   a. Lokasi, dengan dimensi, ketersediaan ruang usaha dan jangkauan perdagangan.
   b. Partisipasi dagang, dengan dimensi, pendapatan tambahan, kesempatan bisnis, modal kecil, memiliki rekanan distributor, permintaan tinggi.
   c. Pemodalan, dengan dimensi, sumber modal, fasilitas pemodalan dan syarat-syarat mendapatkan fasilitas,
   d. Sektor potensial, dengan dimensi, jasa transportasi, jasa penyewaan tempat usaha, jasa penukaran emas ke uang,
   e. Pergerakan orang dan barang, dengan dimensi, banyaknya pergerakan orang dari luar Papua/Indonesia, banyaknya pergerakan barang dari Indonesia ke Korowai, dan penyelundupan barang,
   f. Keamanan wilayah dengan dimensi situasi politik dalam negeri.

Dari tiap variabel/dimensi yang telah ditentukan tersebut, akan dianalisa agar dapat ditemukan posisi wilayah yang diteliti dalam kuadran SWOT. Rangkuti (2014) menjelaskan lebih jauh bahwa kuadran SWOT terdiri dari 4 kuadran yang memiliki arti tersendiri, yaitu:

1. Kuadran pertama adalah posisi yang sangat menguntungkan karena wilayah memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan agar dapat mencapai tujuan pembangunan atau juga pertumbuhan yang agresif.
2. Kuadran kedua adalah walapun menghadapi tantangan, tetapi suatu wilayah memiliki kekuatan internal, sehingga strategi yang dapat digunakan adalah memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meminimalisir ancaman.
3. Kuadran ketiga adalah dimana suatu wilayah memiliki peluang yang besar tetapi wilayah tersebut memiliki kelemahan secara internal.
4. Kuadran keempat adalah dimana suatu wilayah menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan dimana suatu wilayah harus menghadapi kelemahan dan ancaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dimana bentuk strategi analisa ini bermuara pada penyatuan/koparasi analisa data kualitatif dan kuantitatif. Tempat yang dijadikan objek penelitian adalah masyarakat Korowai lokal di perbatasan tanah Merah dengan Masyarakat luar Papua. Alasan pemilihan tempat ini karena masyarakat Korowai dengan masyarakat luar papua adalah satu-satunya cara pandang yang berbeda tentang pasar perdagangan ekonomi, aktivitas kebijakan investasi lahan, Izin pemanfaatan hutan dan lahan perdagangan antar wilayah korowai. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Focus Group Discussion (FGD), yaitu diskusi mendalam untuk menggali informasi-informasi penting terkait masalah yang di teliti.
2. Interview, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab dengan pemilik dusun dan masyarakat Korowai di perbatasan tanah Merah dengan Masyarakat luar Papua secara langsung terhadap responden yang menjadi sampel penelitian atau responden yang ada kaitannya dengan studi ini.
3. Studi Pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari pustaka yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

Untuk merumuskan dampak dari kebijakan investasi lahan, Izin pemanfaatan hutan dan lahan perdagangan antar wilayah korowai. Setelah diperoleh berbagai faktor kunci eksternal dan internal yang dituangkan dalam analisis SWOT pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisi SWOT

Internal/Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang(O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
Ancaman (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)

SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats Analisisa SWOT digunakan untuk membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan (Rangkuti,2014). Analisa SWOT dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi internal dan eksternal dianggap sebagai input dalam proses perencanaan, sehingga perencanaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Mengganalisis prospek wilayah perbatasan untuk perdagangan lintas batasan, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan produk lokal yang dapat dihasilkan di wilayah perbatasan dan sektor-sektor potensial lain yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan potensi perdagangan.
3. Menyiapkan wilayah perbatasan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.
4. Menyiapkan perencanaan pengembangan di dalam 5 daerah perbatasan.

Hasil Dan Pembahasan

Geografis 5 Wilayah Perbatasan

Luas Kabupaten Yahukimo 17,512 km^2 perbatasan langsung dengan Kabupaten Pegunungan Bintang dengan luas 15.683 KM^2 , Boven Digoel luas $139'^{0}90$-141^0 km^2, Kabupaten Asmat terletak pada 4^0-7^0 lintas selatan dan 137^0-141^0 bujur timur dan Mappi memiliki luas mencapai 23,824 km^2 terletak diantara 06^028/-56^04/LS mempunyai wilayah perbatasan dengan Timika dan Merauke sepanjang 820 km, mulai dari Tugu MM1 (Monument Meredian) di perbatasan PNG. Korowai minim 33 s/d 88 Hawila merupakan wilayah penambangan rakyat secara tradisional dan Investasi lahan rawan konflik, belum ada izin pemanfaatan hutan lahan pada ekonomi di korowai. Secara makro sepanjang perbatasan, terdapat lima daerah kabupaten yang daerah tropis (hutan) lebat telah dilengkapi pintu atau pos perbatasan resmi di daerah tersebut.

kebijakan Investasi, Izin Pemanfaatan Hutan dan lahan di Korowai

Hutan Alam di Korowai rusak akibat investasi yang gencar dilakukan perusahaan atau asosiasi pedagang lainnya yang dinamai Kawe sangat merusak hutan alam di korowai ini. Salah satu pemilik dusun kali dairam korwai di mining 33 mengemukakan bahwa suku korowai adalah suku yang tertinggal dan sumber daya manusia yang belum mampu untuk mengelola hutan alam termasuk pertambangan, lahan dan tanah miliknya. Masyarakat adat di korowai ini menginginkan untuk mengelola sendiri hutan alam demi kelestarian dan keberlanjutan hutan adat.

Pemerintah Daerah kurang kontrol layanan perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi. Pengesahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tidak langsung memangkas Kewenangan Otonomi Khusus Papua, dalam hal Investasi lahan di Korowai kebijakan Otonomi Khusus Papua tidak secara signifikan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Korowai.

Kewenangan Investasi menjadi ruang dari pemerintah pusat ini menjadi persoalan baru dan kelemahan bagi pemerintah daerah dan pusat terjadi benturan antara komitmen melaksanakan amanat Otonomi Khusus Papua dan komitmen UU Cipta Kerja. Masyarakat adat korowai memiliki pengetahuan yang sederhana bahwa hutan melindungi masyarakat adat dan hutannya, justru lebih condong melindungi kepentingan investasi. Investasi lahan di korowai justru menyebabkan kerusakan hutan alam atau lingkungan membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal, wilayah adat, kehilangan warisan budaya serta alam itu memberikan kekayaan yang besar, memberikan sumber pendapatan yang tinggi, alam mendatangkan investasi yang besar, terbenturlah pertentangan kepentingan antara kepentingan investor dan masyarakat adat.

Tidak ada dampak signifikan dari investasi bagi kesejahteraan ekonomi, pekerjaan, ataupun kesehatan justru masyarakat korowai tidak ada mendapatkan dampak positif dari kehadiran investasi lahan, izin pemanfaatan hutan dan lingkungan alam rusak. Investasi justru menyebabkan kerusakan hutan alam atau lingkungan, membuat masyarakat kehilangan adat dan kehilangan warisan budaya serta pencarian nafkah. Pemerintah daerah melalui kehadiran penanaman modal harus memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat korowai, apalagi dengan kehadiran otonomi khusus papua. Setiap tahun

Illegal Mining tumbuh subur di daerah konservasi, khususnya di Korowai kenapa begitu masif, dan kenapa penegakan hukum dan kenapa venomena ini tidak mampu menyentuh pemodal?

Kekurangan masyarakat korowai pada saat investasi Illegal Mining di minim 88 Hawila beberapa masyarakat mengemukakan bahwa hutan yang disewakan, tanah yang dijual belikan, penebangan pohon Ileggal dan pembabatan pohon sagu tanpa sepengetahuan masyarakat bahkan di tukar dengan supermi, beras dan gula+kopi adalah pembodohan bagi pemerintah daerah dan penghinaan bagi masyarakat korowai bagi peneliti ini ada mafia,mafia-mafia mendulang (kekayaan melalui) investasi di korowai. Kehadiran investasi dalam bentuk Illegal Mining, penembangan kayu dan SDA lainnya tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat hanya sebatas dijadikan sebagai buruh dan karyawan angkot kayu dan Gold Mining.

Masyarakat adat tidak menolak program nasional pemerintah daerah, namun pemerintah daerah harus memiliki kewenangan dan keberpihakan kepada hak wilayat dan adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar masyarakat adat mampu mengelola sendiri hutannya agar tidak rusak dengan hutan merupakan nafas kehidupan masyarakat adat korowai sesuai dengan ada hutan, masyarakat korowai hidup tanpa hutan, mereka tidak akan hidup, segala aktivitas makan dan minum dari hutan itu.

Awal Perdagangan Ekonomi di Korowai

Selama 90-an, orang luar mulai mengeksploitasi wilayah korowai untuk mencari Gaharu sampai tahun 1997 harga 1 kg Gaharu yang dikumpulkan oleh masyarakat korowai (lokal) dengan dijual kepada pedagang dengan harga sekitar Rp 4.000.00 (empat ribu rupiah) kemudian nilai/harga pedagang ini kemudian di jual ke pasar Eropa dan Timur tengah dengannya melonjak pantastik menjadi $1.000 per kilogram. Gaharu dianggap memicu perdagangan cepat dan menimbulkan prostitusi dihutan-hutan. Akibat seks bebas itu, epidemi AIDS mulai meningkat. Akhir dari perdagangan ini memudar pada tahun 1999. Beberapa film dokumentar telah dibuat tentang suku korowai. Pada tahun 1993, sebuah kru film mendokumentasikan korowai mengkonstuksi rumah pohon dan menunjukan rumah praktek kanibalisme. Pada tahun 2011, suku korowai ditampilkan dalam dokumntar human planet di BBC.

Sebelumnya, korowai juga dikunjungi Rupert Stasch, antropologi dari Reed College, Oregon. Dia tinggal bersama mereka selama 16 bulan untuk mempelajari kebudayaan asli. Stasch melakukan penelitian, yang hasilnya sudah diterbitkan dalam jurnal Oceania.

Para penelliti menganggap masyarakat korowai cukup cerdas karena mampu membangun konsep perkampungan pada wilayah yang sebenarnya sulit untuk ditinggali. Di antara sejumlah peneliti dan antropologi, mungkin yang paling fenomenal adalah kunjungan jurnalis yang bernama Paul Rafaele. Dia memang hanya menetap selama empat hari. Namun Rafale menjabarkan perjalanan empat harinya di bulan Mei 2006 dengan sangat jelas.

Menurut Raffaele dalam situs smithsonianmag.com, Raffaele menjelaskan, meski masyarakat Suku Korowai memiliki kebiasaan memakan daging manusia (kanibal), hal itu ternyata tidak dilakukan setiap saat. Mereka juga memakan daging hewan yang bisa diburu seperti burung kasuari, ular, kadal, rusa, atau babi hutan. Mereka juga memenuhi nutrisinya dengan memakan larva kumbang. Berdasarkan informasi dari kembaren, pemandu wisata Raffaele saat itu, masyarakat korowai sejauh ini msih memiliki kebiasaan makan daging manusia. Namun, ritual ini sudah jauh berkurang sejak mereka mulai mengenal dunia luar. Kembaren menambahkan, hampir semua orang dalam suku korowai pernah menjadi kanibal. Prilaku ini bukan sesuatu yang tabu.

Solusi dan aternatif dari dukungan Gubernur Provinsi Papua melalui kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua tahun 2020 sesuai dengan surat Gubernur Nomor 540/6583/SET tentang Penghentian Aktifitas pertambangan rakyat, mendorong penambangan rakyat yang berlokasi di Korowai Kampung Kawe ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Hal ini disebabkan karena aktivitas penambangan dilakukan secara Ilegal Mining dimana di lokasi pertambangan rakyat tersebut sangat memprihatinkan. Dalam surat Gubernur Papua tersebut juga disampaikan kepada Bupati Pegunungan Bintang untuk berkoordinasi Dengan Bupati Boven Dioel, Asmat dan Yahukimo agar menutup semua akses yang menghubungkan lokasi pertambangan rakyat baik laut (sungai), darat serta udara, dari pernyataan tersebut disampaikan laporan Bupati Boven Digoel pada rapat Forkompimda Provinsi Papua tentang daerah penambangan rakyat diajukan kepada Menteri ESDM RI untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), namun sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada solusi dan masih penambangan Illegal Mining di korowai .

Permohonan penetapan WPR diajukan oleh beberapa kepla Daerah kepada Menteri ESDM RI bulan Agustus 2019 dimana di dalamnya tidak hanya tercantum pertambangan rakyat di Kabupaten Pegunungan Bintang, namun juga di Yahukimo, atas permohonan usulan WPR tersebut khususnya untuk Kabupaten Pegunungan Bintang seluas 16 blok dengan total 390,84 hektar, di Kabupaten Yahukimo usulan WPR seluas 11 blok dengan total 268,35 hektar, dimana potensi yang terkandung di dalamnya adalah logam emas.

Nilai Transaksi Perdagangan di Korowai

Transaksi perdagangan di korowai didasari barter barang dengan emas yang dikelola warga di Kampung Kawe, Distrik Kawinggon, perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang-Kabupaten Yahukimo, sifat barter atau menukar barang dengan emas, uang nyaris tidak berlaku di wilayah penambangan tersebut. Seorang Kepala Bidang Produksi Koperasi Kawe atau Asosiasi Pedagang Kawe Senggaup Mining menyatakan menyangkut harga barter di wilayah penambangan 9 bahan pokok atau/sembako sangat diperlukan bukan uang. Seperti rokok surya besar 1 bungkus di tukar dengan emas dua (2) kaca, Susu 1 kaleng juga di tukar dengan emas dua (2) kaca, supermi 1 karton ditukar dengan emas empat (4) gram empat kaca, 5 bungkus supermi ditukar dengan emas dua (2) kaca, Sarden yang kecil ditukar dengan emas dua (2) kaca, sarden yang besar ditukar dengan emas empat (4) kaca, Garam 1 bungkus ditukar dengan emas satu (1) kaca, gula 1 kg ditukar dengan emas satu (1) kaca, gula stengah kg di tukar dengan emas dua (2) kaca, kopi juga ditukar dengan emas dua (2) kaca, rokok 1 bungkus juga ditukar dengan emas dua (2) kaca, 1 slop rokok ditukar dengan emas satu (1) gram itu yang sementara berlangsung di lokasi penambang emas di korowai termasuk yang paling mura.

Sedangkan barang yang paling mahal itu di handphone merk Samsung dan Ovvo di tukar dengan emas 15 gram minyak/bensin 35 liter rata-rata ditukar dengan emas 8 gram sampai dengan 10 gram, beras 1 karung 25 kg/gram ditukar dengan emas 27 gram, beras 10 kg/gram ditukar dengan emas 4 gram, dan nilai uang dilokasi penambangan hampir tidak berlaku karena semua barter dilakukan dengan barang. Penulis menemukan lokasi yang berbeda dari beberapa minim 33 sampai dengan minim 88 hawila pun sama dan ini yang berlaku di wilayah penambangan rakyat di kawe bahkan di setiap Illegal Mining yang ada di lokasi korowai.

Dari hubungan sosial kebanyakan masyarakat korowai sangat rawan kepunahan lahan dari hasil kebijakan investasi dan belum ada izin pemanfaatan hutan dan lahan pada ekonomi korowai. Kekerabatan tradisional yang sudah tercipta sebelum pendulangan emas ini dilakukan oleh masyarakat momuna dan korowai batu dari pinggi sampai dengan mimim 100 perbatasan pegunungan bintang. Sehingga nilai transaksi perdagangan di wilayah perbatasan diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu perdagangan barter dan perdagangan normal.

Dalam mekanisme perdagangan barter, nilai transaksi juga belum di tetapkan harga dan izin pemanfaatan lahan dari Pemerintah Daerah belum ada yang di ijinkan. Artinya transaksi yang dilakukan pada rentang nilai ini dianggap sebagai transaksi perdagangan tradisional yang kemudian disebut sebagai transaksi barter. Sedangkan untuk nilai emas diklasifikasikan sebagai perdagangan normal. Artinya transaksi yang dilakukan pada rentang nilai ini pedagang harus wajib melakukan pelaporan transaksi barang yang ditransaksikan, sebagai pedagang atau pengusaha Indonesia tidak dikenakan beban transaksi barang. Dilain sisi konsumen dari masyarakat korowai lebih khusus OAP sebagai pembeli mengalami kerugikan yang cukup besar dari sisi kerja fisik dan pemanfaatan.

Nilai Tukar Dan Mata Uang

Mata uang yang di tukar dalam melakukan transaksi perdagangan di korowai adalah emas, kayu gaharu dan Kayu Besi. Sampai saat ini barter yang umum dipakai adalah emas logam sebab 99% dari kayu Gaharu dan kayu besi 1 % pengunjung lokasi korowai perbatasan adalah masyarakat luar papua. Sedangkan keadaan di lokasi penelitian, ternyata pelayanan penukaran uang (money changer) resmi belum ada sama sekali. Dari hasil temuan di lokasi penelitian, nilai tukar emas-barang harganya lebih tinggi dari kurs Bank Indonesia, terdapat selisih Rp1.000.000 jutaan,- lebih tinggi dari nilai yang seharusnya. Disini pedagang juga menerima jasa penukaran emas Ilegal Mining.

Transportasi ke Lokasi Korowai

Saat melakukan transaksi perdagangan di korowai normal, pedagang kebanyakan luar papua yang memiliki mobil pribadi maupun sewa mobil Strada, teriton dan jenis mobil lainya dengan harga yang cukup mahal. Transportasi jalan yang cukup rusak dan medang jalan berlubang-lubang ditambah lagi dengan sungai/kali Gabur yang keras membuat harga barang menjadi mahal dan sewa mobil kisaran harga Rp 30.000.00 jutaan sampai dengan 50.000.00 juta pada tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami perubahan jalan akses menjadi pintu jalan masuk bagi penambang-penambang baru notabennya adalah bukan warga korowai.

Daya Beli Masyarakat Korowai

Data Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendahaaan (DJPb) Papua (1 juli 2020) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi papua masih didominasi sektor pertambangan dan pengalian walaupun terjadi penurunan produksi emas dan tembaga akibat curah hujan dan longsor. Tingkat Inflasi domestik per maret mencapai 3,69% yang merupakan andil dari hampir seluruh kelompok pengeluaran. Inflasi yang terkendali menjadi hal positif dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat, serta dari sisi ekternal, kinerja neraca perdagangan masih melanjutkan suplus.

Menurut Press Conference ALCO Regional Papua tahun 2023 bahwat terkait neraca perdagangan di bulan mei tahun 2023 surplus sebesar 587,39 juta dolar AS, dengan ekspor 620,17 juta dolar AS dan Import 32,78 juta dolar AS. Ekspor bulan mei kembali menguat dan tumbuh positif sebesar 33,86 % setelah pada

tiga bulan pertama sempat mengalami kontraksi outlook pertumbuhan ekonomi papua 2023 relatif stabil, di dorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumen rumah tangga maupun investasi, walaupun terjadi ketidakpastian global. Artinya bahwa pertambangan di korowai juga menjadi perdagangan nasional yang sampai hari beroperasi secara Ilegal Mining.

Meningkatkan daya menunjukan bahwa penduduk masyarakat adat korowai yang berdomisili di Pingge sampai dengan mining 33 Distrik Kawinggon Kabupaten Pegubungan Bintang berada rata-rata hidup dalam ambang batas kemiskinan dengan daya beli barter 25 gram/kg emas atau setara dengan Rp 200.000.00,- pada tahun 2023, sedangkan jika dibandingkan dengan daya beli masyarakat di Dekai Kabupaten Yahukimo, pada tahun 2023 daya beli per kapitanya hanya sebesar Rp 1.0000.990,-Perbandingan nilai barter terhadap sembako juga lebih tinggi (1 gram = Rp 800.00,-) sangat menentukan kemampuan masyarakat Korowai untuk mengkonsumsi barang yang bagi warga Korowai di perbatasan 5 kabupaten diperlukan, produk Indonesia tergolong lebih murah dari pada hasil tambangan di lokasi yang di Jual/dibarter dengan orang luar papua. Murahnya produk Indonesia menyebabkan permintaannya tinggi sehingga pedagang tidak kesulitan dalam penetapan harga. Keuntungan usaha yang diperoleh oleh pedagang lebih tinggi dari pada ketika mereka berjualan ditengah hutan korowai ini. Keuntungan yang tinggi tersebut didapat dari selisih nilai tukar mata uang emas ke Rupiah dan juga biaya operasional yang lebih murah (tidak ada beban sewa tempat usaha/investasi lahan dan pemanfaatan hutan alam.

Permintaan dari masyarakat korowai menyebabkan wilayah Korowai semakin terbuka dan menjadi tempat yang menarik bagi pedagang yang melakukan aktivitas di pasar barter liar. Munculnya rumah toko darurat yang mulai berdiri dikawasan korowai, dimanfaatkan oleh pedagang sebagai gudang dan berjualan saat tidak hari terkecuali.

Keterlibatan Orang Asli Korowai Dalam Perdagangan Ekonomi

Sebelum mengenal pembangun masyarakat korowai berbaur dengan alam sebagai sumber pencarian nafkah belum mengenal yang namanya pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, jalan dan tempat beribadah. Dari sini masih sedikit perubahan ketika ada pembangunan masuk di korowai, kebanyakan dari pohon kasih turun oleh pengijil-pengijil dari gereja GIDI, GKII, KINGMI dan GPDI sampai dengan hari ini. Mereka diajarkan banyak hal tentang kehidupan.

Perdagangan ekonomi bagi masyarakat korowai masih relatif kurang termasuk Investasi lahan, pemanfaatan hutan alam dan mengelola sumber daya alam secara tradisional. Sisi kekurangan ini menjadi salah satu kekuatan bagi investor masuk membokar jalan, mencuri kayu besi, emas dan kayu gaharu. Namun tidak dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan fisik maupun menambangan emas di lokasi mereka. Dan ada beberapa orang menjual tanah dengan harga yang cukup relatif rendah bisa dibilang barter dengan gergaji, sensor dan wajang serta barang lainya. Berbeda dengan pedagang asli Papua lainya yang tumbuh disekitar wilayah perbatasan dengan menjual pinang atau pun hasil bumi lainnya, cenderung pembelinya adalah orang papua sendiri. Ketika pasarpun belum ada dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo, masyarakat asli Papua yang berjualan disekitarnya pun masih sedikit ada persaingan dengan orang pendatang mendapatkan jatah los toko secara permanen.

Selain itu ketika pertama kali pedagang pendatang datang ke wilayah ini, mereka menghadapi kesulitan dalam bahasa ketika bertransaksi, sehingga beberapa pedagang juga menggunakan tenaga orang asli Papua di korowai sebagai tenaga penerjemah dengan upah sebesar Rp. 100.000,- per hari sambil para pedagang juga mempelajari bahasa sehari-hari orang di korowai.

Saat ini para pedagang sudah mengerti bahasa orang korowai sehingga mereka tidak lagi menggunakan tenaga penerjemah. Sedangkan orang Papua yang mendapatkan jatah los toko di korowai tidak menjalankan usahanya. Mereka semua menyewakan kembali los tersebut kepada para pedagang yang membuka dengan harga Rp.20.000.000,- per tahun.

Para pedagang non-Papua yang menyewa, menggunakan los tersebut sebagai gudang untuk penyimpanan barang atau membuka usaha dagang yang kemudian dikelola oleh kerabat/saudara mereka.

Tabel 2 Nilai, Bobot, Rating dan Skor dari Dimensi Kekuatan

No	Weakness	Nilai	Bobot	Rating	Skor
1	Memiliki pangsa pasar/Investasi	1	0.04	5	0.09
2	Permintaan tinggi	5	0.22	5	0.09
3	Penyaluran dana pemerintah	4	0.17	4	0.70
4	Memasarkan komoditas lokal	2	0.09	4	0.53
5	Pengembangan jasa angkutan	1	0.04	5	0.22
6	Peningkatan pendapatan	2	0.09	4	0.35
7	Penyewaan tempat usaha	3	0.13	4	0.52
8	Pertumbuhan lapangan kerja baru	1	0.04	4	0.17
Total		20		35	4.48

Keterangan:

Penilaian Kondisi Saat ini	Rating
Angka 1 = Kurang	Angka 1 = Tidak penting
Angka 2 = Cukup	Angka 2 = Kurang penting
Angka 3 = Agak baik	Angka 3 = Agak penting
Angka 4 = Baik	Angka 4 = Penting
Angka 5 = Sangat baik	Angka 5 = Sangat penting

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil Analisa SWOT

Kekuatan

Hasil perhitungan dimensi kekuatan hampir semuanya menujukan bahwa jumlah pendatang baru, pendapatan dari investasi lahan dan perdagangan di korowai, kedekatan dengan masyarakat korowai, kemampuan adaptasi pedagang pendatang, memiliki rekan distributor, dan posisi strategis mendapatkan nilai tertinggi yaitu 5, dengan bobot tertinggi yaitu 0,10. Harga yang murah, kerjasama pemerintah, perusahaan dan masyarakat, kestablian profit usaha investasi dagang, dan kemudahan penetapan harga, mendapat nilai 4, dengan bobot sebesar 0,08. Sedangkan kualitas barang mendapatkan nilai terendah yaitu 3 dengan bobot 0,06.

Kelemahan

Dari dimensi kelemahan hanya penetapan WPR persyaratan dan mendapatkan perhatian pemerintah daerah belum ada yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu 5 dengan bobot 0,22 dengan rating atau urgensi penanganan -1. Ketersediaan sarana dan prasarana investasi lahan, pemanfaatan hutan, ekspor-impor serta prosedur ekspor mendapatkan nilai 4 dengan 0,17 dengan rating -2. Pendampingan pemerintah untuk masyarakat korowai mendapatkan nilai 2 dengan bobot 0,04 dan urgensi penanganan dinilai -5. Partisipasi dagang orang asli korowai, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, ketersediaan fasilitas penjualan emas/uang, penggunaan mata uang rupiah, dan ketersediaan lembaga perkreditan mendapatkan nilai 1 dengan bobot 0,04 dengan rentang rating -4 dan-5.

Tabel 3 Nilai, Bobot, Rating dan Skor dari Dimensi Kelemahan

No	Weakness	Nilai	Bobot	Rating	Skor
1	Partisipasi dagang masyarakat adat/korowai	1	0.06	-4	-0.24
2	Pendampingan pemerintah untuk masyarakat korowai	2	0.12	-4	-0.47
3	Ketersediaan sarana & moda transportasi	1	0.06	-4	-0.24
4	Sarana dan prasarana migrasi, dan ekpor-impor.	3	0.18	-3	-0.53
5	Ketersediaan pemerintah dan asosiasi dagang	1	0.06	-2	-0.12
6	Persyaratan mendapatkan dana pemerintah	5	0.29	-1	-0.29
7	Kemudahan nilai jual/ekpor emas	4	0.24	-2	-0.47
Total		17		-20	-2.35

Keterangan:

Penilaian Kondisi Saat ini	Rating
Angka 1 = Kurang	Angka 1 = Tidak penting
Angka 2 = Cukup	Angka 2 = Kurang penting
Angka 3 = Agak baik	Angka 3 = Agak penting
Angka 4 = Baik	Angka 4 = Penting
Angka 5 = Sangat baik	Angka 5 = Sangat penting

Sumber: Data Diolah, 2023

Peluang

Dari dimensi peluang pangsa pasar, permintaan barang dagang/investasi memperoleh nilai 1 dengan bobot 0,04. Penyaluran kredit bagi pedagang mendapatkan nilai 4 dengan bobot 0,15. Pendatang baru di lokasi korowai dan penyewaan tempat usaha memperoleh nilai 3 dengan bobot 0,12. Peluang memasarkan komoditas lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat korowai mendapatkan nilai 2 dengan bobot 0,08. Peluang mengembangkan Jasa transportasi dan penyerapan tenaga kerja lokal mendapatkan nilai 1 dengan bobot 0,04. Rata-rata ratingnya adalah 5, artinya permintaan sangat berpeluang untuk dilibatkan masyarakat korowai.

Ancaman

Dari dimensi ancaman, isu pendatang-pribumi, persoalan hak ulayat dan pergerakan TPNPB-OPM di Korowai mendapatkan nilai 5 dengan bobot 0,28. Dengan rating nilai 5 artinya sangat mengancam.

Sedangkan penutupan pertambangan wilayah Korowai karena alasan keamanan mendapatkan nilai 3 dengan bobot 0,17, dengan rating 3 artinya agak mengancam.

Pemanfaatan Lahan dan Ekonomi Korowai Masyarakat Korowai

Dari hasil analisis SWOT diatas maka dapat dilihat beberapa kemanfaatan yang dapat diperoleh dari kebijakan investasi hutan, pemanfaatan hutan alam aktivitas pertambangan perdagangan di korowai Kabupaten Yahukimo, yaitu:

Potensi sektor-sektor lain untuk bertumbuh

Sektor lain yang pada saat ini ikut bertumbuh adalah jasa transportasi dan usaha bengkel. Kedua usaha ini juga digerakan oleh warga pendatang dari wilayah pinggi sampai korowai batu kampung di korowai. Rata-rata, penyedia jasa Transportasi yang terdiri dari mobil berantas 10 orang ini mendapatkan omset per hari pasar sebesar Rp 20.000.000;- sedangkan usaha bengkel adalah satu-satunya usaha bengkel di seradala milik Perusahaan PT.Simaka, usaha ini mampu memperloeh omset sebesar Rp 100.000.000;- per hari pasar dengan mempekerjakan 5 orang tenaga kerja yang adalah karyawan perusahaan dan anggota keluarganya sendiri. Kurangnya alat transportasi di wilayah korowai memberikan angin segar bagi penyedia jasa mobil sehingga mereka mampu untuk mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi perhari pasar juga jasa bengkel.

Tabel 4 Nilai, Bobot, Rating dan Skor dari Dimensi Peluang

No	Opportunity	Nilai	Bobot	Rating	Skor
1	Memiliki pangsa pasar	5	0.22	5	1.09
2	Permintaan tinggi	5	0.22	5	0.09
3	Penyaluran kredit usaha bagi kewirausahaan	4	0.17	4	0.70
4	Memasarkan komoditas lokal	2	0.09	4	0.53
5	Pengembangan jasa angkutan	1	0.04	5	0.22
6	Peningkatan pendapatan	2	0.09	4	0.35
7	Penyewaan tempat usaha	3	0.13	4	0.52
8	Pertumbuhan lapangan kerja baru	1	0.04	4	0.17
Total		23		35	4.48

Keterangan:

Penilaian Kondisi Saat ini	Rating
Angka 1 = Kurang	Angka 1 = Tidak berpeluang
Angka 2 = Cukup	Angka 2 = Kurang berpeluang
Angka 3 = Agak baik	Angka 3 = Agak berpeluang
Angka 4 = Baik	Angka 4 = Berpeluang
Angka 5 = Sangat baik	Angka 5 = Sangat berpeluang

Sumber: Data Diolah, 2023

Artinya, sebenarnya sektor jasa yang ikut berkembang ini merupakan dampak dari permintaan dari luar (Adisasmita, 2005). Dalam konsep ini, perkembangan investasi lahan dan pemanfaatan hutan di korowai membawa dampak kemudahan bagi masyarakat korowai di wilayah pinggiran kota yang belum berkembang, kemudahan menurut Purnomosidi dalam Adisasmita (2005) tercipta akibat dari simpul jasa yang terbentuk dari kota-kota yang aktivitas jasa dan perdagangannya lebih tinggi, simpul jasa ini digerakan oleh keputusan para pedagang yang menyalurkan barang ke wilayah-wilayah pinggiran. Oleh sebab itu tercipta satu kumpulan kegiatan ekonomi yang bersifat homogen yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada pasar atau membuka pasar yang baru. Hal inilah yang saat ini terjadi di korowai, namun sistem Ilegal minig.

Kemudahan ini dalam pandangan Weber (Adisasmita, 2005) menitik beratkan bahwa kemudahan merupakan suatu kondisi yang dapat menarik kegiatan investasi, tetapi dalam konteks penelitian ini kemudahan yang di ajukan oleh Weber ini dilihat sebagai penarik sektor investasi yang memproduksi jasa, seperti jasa transportasi dan bengkel. Industri yang mulai bertumbuh ini merupakan konsep daya tarik aglomerasi dari Weber yang ditimbulkan dari kumpulan para usaha perdagangan yang merupakan kumpulan usaha homogen. Artinya, kegiatan perdagangan sebagai kegiatas bisnis homogen di korowai mampu untuk menarik kegiatan komplementer (sektor jasa lainnya) untuk beroperasi di korowai.

Dengan hadirnya Asosiasi Perdagangan Kawe atau perusahaan pertambangan baru akibat daya tari yang ditimbukan oleh perdagangan di korowi, sebenarnya menyimpan potensi dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat adat korowai sehingga masyarakat Korowai, peluang ini apabila dimanfaatkan dengan baik, sangat berpotensi untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana investasi lahan dan pemanfaatan hutan alam masyarakat korowai, walaupun tidak terlibat langsung dalam kegiatan Ilegal Mining.

Potensi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Korowai Melalui kegiatan Investasi Lahan dan Pemanfaatan Hutan ekonominya

Pembahasan pada bagian sebelumnya, potensi peningkatan pendapatan dari Investasi lahan dan ekonomi Korowai diperbatasan 5 Kabupaten ini sebenarnya mampu untuk menarik bisnis-bisnis lokal baru untuk berkembang dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat korowai untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka lewat aktivitas Gold Mining di barter atau dengan barang ataupun dalam bentuk bisnis pendukung yang lain. Hanya saja kesempatan ini belum menarik partisipasi masyarakat Korowai, padahal atas kemauan masyarakat asli Papua di Korowai. Bagaimana pemerintah menyediakan losmen pasar permanen agar masyarakat asli Papua bisa ikut dalam kegiatan perdagangan di wilayah Kawe sampai dengan minim 100 di pegunungan bintang.

Kemungkinan besar losmen yang diberikan kepada orang asli Papua, jangan disewakan kembali kepada pedagang dari luar Papua yang tidak mendapatkan tempat atau ingin memulai usaha dagang di Korowai atau dipergunakan sebagai gudang untuk menampung stok barang dagangan. Pemilik losmen tersebut mengenakan tarif berupa barter dagang sebesar Rp 200.000.000;- per tahun.

Tabel 5 Nilai, Bobot, Rating dan Skor dari Dimensi Ancaman

No	Treath	Nilai	Bobot	Rating	Skor
1	Isu pendatang dan pribumi (Amber-Komen)	5	0.28	-5	-1.39
2	Persoalan hak ulayat	4	0.22	-5	-1.11
3	Pergerakan TPNPB-OPM di Lokasi Tambang	5	0.28	-5	-1.39
4	Penutupan wilayah tertambangan karena Alasan Keamanan	4	0.22	-3	-0.67
Total		18	1	-18	-4.56

Keterangan:

Penilaian Kondisi Saat ini	Rating
Angka 1 = Kurang	Angka 1 = Tidak berpeluang
Angka 2 = Cukup	Angka 2 = Kurang berpeluang
Angka 3 = Agak baik	Angka 3 = Agak berpeluang
Angka 4 = Baik	Angka 4 = Berpeluang
Angka 5 = Sangat baik	Angka 5 = Sangat berpeluang

Sumber: Data Diolah, 2023

Walaupun dari sisi yang lain, munculnya jasa penyewaan ini merupakan suatu dampak yang baik bagi atas hadirnya transaksi barter lintas daerah yang dapat mendorong masuknya para wirausahawan baru ke wilayah ini karena peluang yang datang akibat permintaan dari luar wilayah, akan tetapi menurut peneliti ini adalah suatu keadaan stagnan dari peningkatan ekonomi dalam pendapatan suku korowai/ asli papua dalang kecemburuan sosial.

Max Weber (1958), dalam tulisannya Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism (The Spirit of Capitalism), berpendapat bahwa waktu luang yang digunakan untuk mengerjakan kegiatan yang bersifat produktif akan meningkatkan penghasilan yang diperoleh, dari pada waktu luang tersebut digunakan untuk bersantai. Dengan kata lain, sebenarnya jika peraturan daerah dan prosedur tentang lintas batas dan investasi lahan dan pemanfaatan hutan dengan ekonomi dilengkapi fasilitas dagang yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat Korowai/ orang asli Papua sebenarnya akan menghasilkan lebih banyak dari pada pembiaran di lakukan kepada para pedagang kawe di korowai . Sebab waktu pause untuk menunggu dalam setahun mengurangi produktifitas pemilik lahan dan ekonomi untuk dapat memperoleh pendapatan maksimal jika pemilik tanah adat korowai menginvestasikan waktunya untuk memanfaatkan waktu yang dimiliki dan fasilitas yang sudah disediakan untuk melakukan aktivitas dagang papua lainnya. Jika kita menghitung kembali dengan sebuah ilustrasi sederhana misalnya, jika: harga sewa pertahun Rp 20.000.000;- hari pasar 96 kali per tahun. Dalam ilustrasi sederhana dapat diprediksi total pendapatan dari penyewaan tempat usaha tersebut:

$$\text{Pendapatan } \frac{20.000.000}{96} = 208.333$$

Maka, pendapatan masyarakat per hari pasar hanya sebesar Rp 208.333;- atau setara dengan Rp 1.666.667;- per bulan. Dari ilustrasi perhitungan pendapatan masyarakat korowai yang menyewakan fasilitas dagang mereka dan ketika dibandingkan dengan data pendapatan para pedagang per hari, mereka mampu meraup keuntungan berkisar antara Rp 3.000.000;- sampai Rp 40.000.000;- perhari pasar, maka ditemukan perbedaan yang sangat signifikan. Selain disebabkan oleh kemampuan/etos berdagang masyarakat korowai, menurut teori piihan waktu, para pedagang juga mampu untuk menginvestasikan waktu mereka untuk bekerja dan memaksimalkan segala sumber daya (waktu) yang mereka punya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari kegiatan perdagangan di perbatasan.

Kurva 1. Kurva Indiferent Pilihan Waktu dan Pendapatan

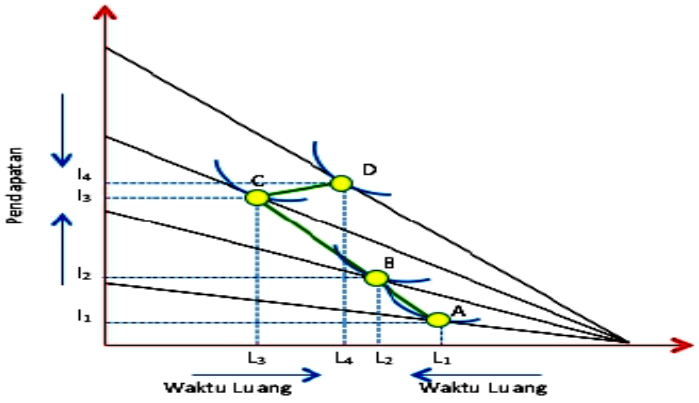

Sumber: Sugiarto et al, 2002

Dalam kurva indiferen, diperlihatkan bahwa pilihan waktu berdampak kepada pendapatan masyarakat, artinya ketika masyaraklat asli papua menginvestasikan waktunya untuk bekerja maka tingkat upah yang didapat akan semakin tinggi, bergeser dari titik A ke B dan C, sedangkan pada titik D adalah dimana masyarakat merasa cukup puas dengan pendapatan yang diperoleh sehingga orang tersebut memilih untuk menggunakan waktu luangnya, sehingga walaupun mungkin pedapatannya bisa tetap naik tapi tidak akan sesignifikan ketika waktu yang ada tetap digunakan untuk bekerja. Dengan meningkatnya pendapatan maka diharapkan bahwa tingkat kesejahteraan asli papua akan menjadi lebih baik, kondisi ini yang sampai saat ini masih membedakan pola tingkah laku suku pendatang dan pribumi dalam menginvestasikan waktu masyarakat korowai.

Jika masyarakat asli Papua yang memiliki hak guna pakai investasi lahan dan pemanfaatan hutan dan meraut ekonomi diperbatasan mampu menginvestasikan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan maka tidak akan menutup kemungkinan orang Papua mampu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang baik dan kesenjangan antara masyarakat pribumi dan pendatang semakin menipis.

Solusi dan Peluang Strategi yang dapat dilakukan untuk Mengembangkan Korowai

Dari hasil pengukuran analisis SWOT pada tiap sub dimensi, maka dapat ditentukan perankingan solusi dan strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong pengembangan wilayah potensi perdagangan. Dari hasil pengukuran tiap sub dimensi pada analisis SWOT jika dituangkan dalam Grafik, ternyata kondisi perdagangan (Ilegal Mining) kebijakan investasi lahan, review izin pemanfaatan hutan dan lahan pada ekonomi korowai Kabupaten Yahukimo berada pada kuadran I.

Posisi kondisi perdagangan Korowai

Kuadrat	Posisi Matriks	Luas Matriks	Rangking	Solusi dan Peluang	Kondisi Eksisting	
S :O	(4.65:4.48)	20.84	1	Comparative advantages		
W:O	(-2.35:4.48)	10.53	3	Divestment/investment	x	y
W:T	(-2.35:-4.17)	10.97	2	Damage Control		
S :T	(10.91:-4.17)	21.72	4	Mobilization	3.475	2.465

Sumber: Data Diolah 2023

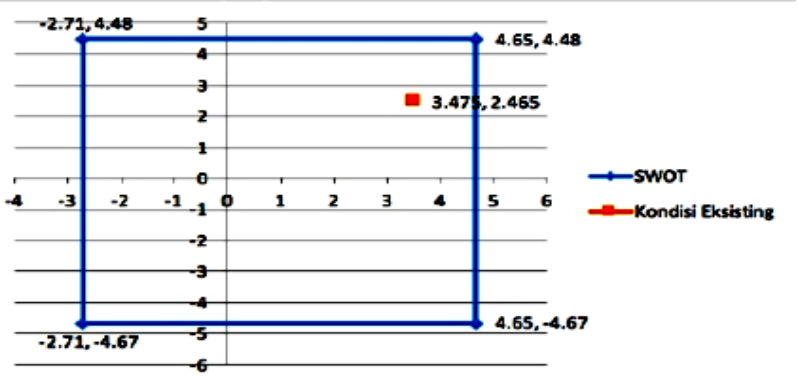

Sumber: Data Diolah 2023

Ranking 1: Comparative Advantages (S-O)

Secara komparatif daerah Korowai memiliki keunggulan yaitu serbahan emas biji pasir dengan harga yang lebih mahal dari harga Gold PT Freeport Indonesia atau daerah lainnya. Daerah Korowai sekarang menjadi kebijakan investasi lahan, review izin pemanfaatan hutan dan lahan pada ekonomi korowai mengakibatkan daya sisi ketertarikan pedagang dan konsumen untuk bertransaksi di wilayah perbatasan didorong oleh beberapa faktor penting. Dari sisi pedagang, ketertarikan mereka ke wilayah Korowai didorong oleh faktor kedekatan dengan konsumen, permintaan tinggi, daya beli yang tinggi, biaya operasional lebih mahal tapi menguntungkan dan kemudahan melakukan ekspor. Dari sisi konsumen adalah kemudahan mendapatkan barter barang, harga yang lebih mahal tapi menguntungkan, jarak yang lebih lebih jauh dari ibu kota dekai tapi inpraktrukstur jalan bagus. Sehingga ketika Perpaduan antara kekuatan dan peluang dituangkan di dalam grafik SWOT maka dapat dilihat bahwa kondisi perdagangan di korowai berada pada kuadran I yang berarti, kondisi investasi lahan, pemanfaatan hutan dan ekonomi korowai memiliki keunggulan komparatif.

Kemudian hal ini menarik berbagai pihak untuk masuk ke wilayah korowai untuk meraih peluang-peluang yang tersedia. Contohnya adalah terbukanya peluang bagi pedagang untuk mengembangkan perekonomian masyarakat korowai berbasis perdagangan barter emas dengan barang dagangan lainnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat korowai melalui perusahaan-perusahaan dan koperasi Ilegal Mining yang dibentuk dengan kerjasama antara swadaya masyarakat asli korowai.

Ranking 2: Damage Control (W-T)

Dari peluang yang sudah tersedia dari berkembangnya kegiatan perdagangan di korowai, ternyata peluang tersebut belum mampu untuk diserap oleh masyarakat korowai di wilayah Ilegal Mining tersebut, sehingga terjadi kesenjangan dalam pendapatan. Seperti yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat korowai belum mampu untuk memaksimalkan waktunya untuk berdagang sebab secara kultur budaya masyarakat asli Korowai bukanlah masyarakat yang menempatkan kegiatan berdagang sebagai filosifi hidup.

Di lain sisi, pengalaman masyarakat Asli Papua juga masih sangat minim, artinya bahwa jika dibandingkan dengan para pedagang yang berasal dari korowai asli di korowai mereka sangat minim pengalaman, akses kepada modal dan juga akses kepada pemasok barang (distributor). Hal ini yang menyebabkan masyarakat dikorowai menjual lahan dan pemanfaatan hutanpun sembarang dilakukan dan mudah sekali untuk terprovokasi ketika ada phak-pihak yang tidak bertanggung jawab memainkan lahan dan isu kesenjangan ekonomi antara masyarakat Korowai (terutama orang non Papua) untuk mengacaukan keamanan di wilayah korowai .

Oleh sebab itu, dari identifikasi kelemahan dan ancaman yang menghambat pembangunan ekonomi di wilayah korowai melalui kegiatan perdagangan Ilegal Mining, maka strategi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dagang masyarakat Korowai agar mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan perkembangan potensi perekonomian di korowai.
2. Meningkatkan partisipasi dagang masyarakat korowai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo untuk menerbitkan ijin pemanfaatan hutan adat dan invertasi lahan.
3. Menyediakan informasi dagang agar masyarakat mampu untuk membangun hubungan dengan distributor.
4. Melembagakan suatu wadah yang mampu memfilter isu-isu peluang dan kesempatan yang sedang terbuka dalam pengembangan ekonomi masyarakat korowai dari sisi kebiajakan investasi, pemanfaatan lahan dan ekonomi korowai.

Ranking 3: Divestment/Invesment (W-O)

Dari setiap peluang yang tersedia dari hadirnya perdagangan di perbatasan ternyata belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduk lokal diperbatasan, sebab yang menjadi kelemahan penduduk diperbatasan adalah keterbatasan akses kepada informasi, kemampuan berdagang, pemodalah, dan juga akses kepada distributor yang masih sangat kurang. Untuk meningkatkan kapasitas penduduk lokal di perbatasan agar mampu untuk meminimalisir kelemahan dan mampu menangkap peluang-peluang yang sudah tersedia tersebut, maka strategi yang bisa diambil untuk memberdayakan masyarakat lokal di perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sektor-sektor lain yang sesuai dengan kapasitas masyarakat perbatasan.
2. Menyediakan sarana transportasi ke wilayah perbatasan secara keseluruhan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik di perbatasan.

Ranking 4: Mobilization (S-T)

Potensi kekuatan di wilayah korowai akibat hadirnya kegiatan perdagangan membawa dampak yang cukup baik bagi mereka yang pada saat ini menggantungkan hidupnya dari kegiatan mining Gold di wilayah ini. Para pedagang mampu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi keadaan ini jika tidak ditunjang dengan keamanan yang baik maka, cenderung perkembangannya akan menjadi lambat atau bisa saja terhenti. Faktor keamanan memainkan peran penting di wilayah korowai sampai pada saat ini seperti

yang terjadi di tahun 2023 bahwa, gangguan keamanan oleh TPNPB-OPM & TNI/POLRI di distrik seradala di kali Ei menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik rakyat sipil (pedagang pendatang) dan juga petugas keamanan. Sehingga Korowai menjadi zona merah harus ditutup dan ada ijin pemerintah daerah dalam Ilegal mining dan para pedagang juga menderita kerugian.

Dari kekuatan yang dimiliki di korowai, dapat digunakan untuk meminimalisir ancaman yang ada dengan meningkatkan kapasitas penduduk asli korowai papua agar mampu untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada, maka trategi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan regulasi yang adil bagi masyarakat korowai untuk melindungi hak adatnya. Menjaga stabilitas wilayah dan kebijakan investasi lahan, review izin pemanfaatan hutan dan lahan pada ekonomi dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat korowai.
2. Meningkatkan keamanan wilayah perlu dilakukan penutupan Ilegal Mining di korowai dan penutupan perusahaan-perusahaan ilegal di hutan korowai.
3. Meningkatkan rasa aman bagi pedagang Asli Papua dan Non Papua yang ada wilayah Korowai dan Kabupaten Yahukimo.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari penelitian ini:

1. Potensi kerusakan hutan, Ilegal dalam kebijakan investasi lahan, kurangnya review izin pemanfaatan hutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.
2. Perlu melakukan pembinaan perdagangan pada ekonomi sangat menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di korowai, tetapi penduduk di korowai belum terserap ke dalam aktivitas perdagangan tersebut karena keterbatasan modal dan juga jaringan distribusi barang dari distributor dari kota dekai. Sehingga manfaat ini hanya dapat di raih oleh para pedagang pendatang yang awalnya masuk Ilegal Mining dimana mereka secara pengalaman dan modal sudah lebih mapan.
3. Barang yang diperdagangkan di korowai adalah barang hasil industri yang pada saat ini hanya mampu diproduksi di pulau Jawa dan barang-barang ini sesuai dengan permintaan masyarakat korowai sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, seperti mie instan, Gula kopi dan beras dan lainnya. Sedangkan hasil bumi (barang mentah) dari korowai sendiri tidak laku dijual di hasil pemburuan daging-daging, sayuran dan lainnya, permintaannya cenderung dari masyarakat di luar papua.
4. Pemerintah perlu untuk menyediakan bantuan modal dan jalur pemasaran produksi lokal, meningkatkan pelatihan dan pengembangan kualitas SDM penduduk korowai serta pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat asli Papua dalam perdagangan dan agribisnis. Hal ini membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan untuk mengontrol kemajuan dari program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam mengembangkan potensi wilayah Korowai Kabupaten Yahukimo.
5. Perlu menghidupkan sektor jasa angkutan umum bagi penduduk korowai, sebab pada saat ini orientasi penjualan hasil bumi maupun aktivitas lainnya masih cenderung berkiblat ke kota dekai, pegunungan bintang dan boven digoel, sehingga hasil bumi yang di produksi dapat diangkut dengan mudah dan biaya transportasinya jauh lebih murah.

Daftar Pustaka

Awang, Abd Hair, Junaenah Sulehan, Noor Rahaman Abu Bakar, Mohd Yusof Abdullah dan Ong Puay Liu (2013). Asian Social Science, Vol. 9, No.4.

Adisasmita, Rahardjo (2005). Pembangunan Ekonomi Perkotaan: Graha Ilmu Yogjakarta

Ratya Anindita, Michael R.Reed (2012:14). Bisnis dan Perdagangan Internasional, Andi Yogyakarta

Raffaele Among the Korowai. https://www.smithsonianmag.com/science-nature/raffaele-among-the-korowai-126960807/ diakses 23/09/2023 di papua.

Slamet (2012). Perbatasan RI-RDTL: Arti Penting dan Sumber Ancaman. http://linggaakmil98.blogspot.com/2011/03/v-behaviorurldefaultvml.o.htlm, Diakses 23/09/2023.

Titeca, K. (2009).The Changing Cross-Border Trade Dynamics between north-western Uganda, North-Eastern Congo and Southern Sudan. Working Paper No. 63, Institute of Development Policy and Management, University of Antwerp.

Leadem, Danie Francisco Avendano (2013). An Approach Toward Sustainability On Cross Border Regions. Revisra Georafica de America Central No. 50,141-164.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan produksi.

Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi.

Rangkuti, Freddy (2014). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta, PT Gramedia Pustaka
Siagian , SP (1983). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung
Siburian, Robert (2011). Ikatan Budaya Masyarakat Lintas Batas Sebagai Modal Sosial Pembangunan Daerah Perbatasan Di Kabupaten Belu. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. XIX(1). LIPI Press.
Weber, Max (2001). Protestant Ethic And The Spirit of Capitalism. Routledge Classic. London.
Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
https://www.sciencedirect.com/journal/forest-policy-and-economics
(http://www.jeratpapua.org/2015/03/29/mengenal-suku-korowai-di-selatan-papua/)
https://papua.antaranews.com/berita/565618/harga-beras-dijual-di-lokasi-penambangan-emas-korowai-rp2-juta10-kg
https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/surplus-tiga-tahun-berturut-turut-neraca-perdagangan-indonesia-april-2023-tembus-usd-394-miliar